

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DOKUMEN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan petunjuk-Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

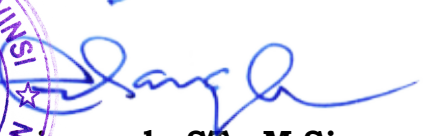
Renja Dinas ESDM Tahun 2026 ini disusun dalam rangka mendukung program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan serta mempunyai kedudukan strategis dalam rangka menjembatani antara perencanaan pembangunan Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya mineral ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dinas, penyusunan perencanaan APBD Provinsi, serta pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Renja ini diharapkan juga dapat memberikan acuan dan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Palembang, 05 Januari 2026
Kepala Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,




Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
3.1 Arah Kebijakan	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
Bab V Penutup	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Total Belanja Tahun 2025	5
Tabel 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025	5
Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	6
Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	19
Tabel 2.3 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan	20
Tabel 2.3.1 Jalan Khusus Batubara	21
Tabel 2.3.2 Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batubara	22
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	27
Tabel. 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas ESDM Prov. SUMSEL Tahun 2026	28

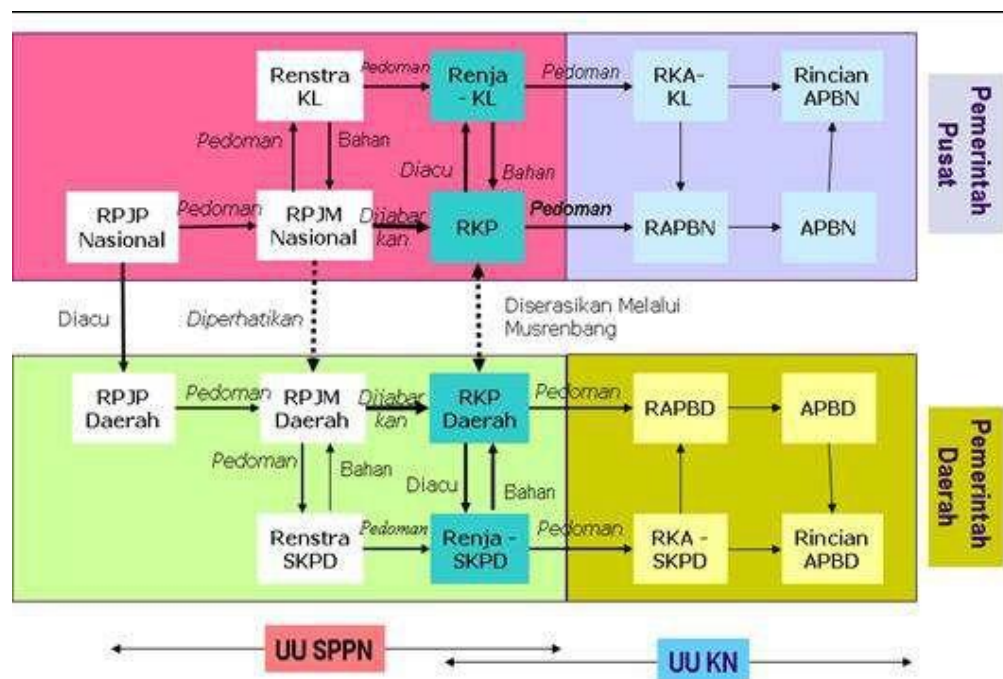
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis data eksisting. Usulan program/kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sinkronisasi terhadap dokumen- dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing program/kegiatan. Hubungan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya pada level pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah peraturan tentang pemerintahan, perencanaan dan pembangunan dan peraturan yang terkait dengan penganggaran dan keuangan. Peraturan-peraturan yang dimaksud antaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut:

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun berjalan;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD periode waktu 2025–2029;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam Renstra periode waktu 2019 – 2023;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan Energi dan Sumber daya mineral;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2026 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Renstra SKPD serta mendukung RPJMD tersaji dalam realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Total Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target s.d. Triwulan ini (%)	Persentase $5=3/2*100\%$
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	26.148.167.258	13.398.422.838	100	89,87
a. Belanja Pegawai	18.311.638.000	17.148.109.937	100	93,65
b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258	6.746.833.462	100	86,09
Belanja Modal	595.173.000	579.537.991	100	97,37
a. Belanja Modal Peralatan dan	595.173.000	579.537.991	100	97,73
TOTAL	26.743.340.258	24.474.481.390	100	91,52

Tabel 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = $3/2 * 100\%$)	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	24.613.356.778	22.567.513.971	100	91,69	100	100
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.418.000	96.745.100	100	96,34	100	100
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	729.690.200	631.723.753	100	90,54	100	100
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	236.473.300	145.736.400	100	61,63	100	83,33
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.063.401.980	1,032,762,166	100	97,12	100	100
TOTAL	26.743340.258	24.474.481.390	100	91,52	100	96,67

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DESDM		%	100	100,00	26.743.340.258	24.474.481.390	91,52	96,67
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100,00	24.613.356.778	22.567.513.971	91,69	100,00
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100,00	92.300.000	90.648.007	98,21	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	100,00	17.000.000	16.039.792	94,35	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100	100,00	75.300.000	74.608.215	99,08	100,00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100,00	19.028.938.000	17.752.789.937	93,29	100,00

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	100,00	18.311.638.000	17.148.109.937	93,65	100,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100	100,00	494.340.000	390.360.000	78,97	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	100,00	222.960.000	214.320.000	96,12	100,00
iii	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	100,00	752.500.000	641.141.970	85,20	100,00
1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	100	100,00	752.500.000	641.141.970	85,20	100,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100,00	70.000.000	65.629.000	93,76	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	100,00	70.000.000	65.629.000	93,76	100,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100,00	1.437.844.250	1.374.131.179	95,57	100,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100,00	50.000.000	49.976.805	99,95	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100,00	412.844.250	412.829.993	100,00	100,00

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	100,00	330.000.000	315.579.040	95,63	100,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	100,00	140.000.000	108.430.591	77,45	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100	100,00	15.000.000	12.772.000	85,15	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100,00	490.000.000	474.542.750	96,85	100,00
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	1.687.128.800	1.548.473.568	91,78	100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100,00	5.000.000	4.700.000	94,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	100,00	633.128.800	494.773.568	78,15	100,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	100,00	1.049.000.000	1.049.000.000	100,00	100,00

viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	1.194.645.728	761.592.312	63,75	100,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	100	100,00	1.079.645.728	646.601.962	59,89	100,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100,00	0	0	0	0,00
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100,00	115.000.000	114.990.350	99,99	100,00
ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	200.000.000	183.107.998	91,55	100,00
1	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Laporan	100	100,00	200.000.000	183.107.998	91,55	100,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	%	100	100,00	100.418.000	96.745.100	96,34	100,00
i	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	%	100	100,00	50.210.000	47.157.800	93,92	100,00
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Dokumen	100	100,00	50.210.000	47.157.800	93,92	100,00
ii	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya implementasi	%	100	100,00	50.208.000	49.587.300	98,76	100,00

		Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi							
1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan iar tanah dalam daerah provinsi	Laporan		100,00	50.208.000	49.587.300	98,76	100,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	%	100	100,00	729.690.200	631.723.753	90,54	100,00
i	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	%	100	100,00	88.648.000	86.269.600	97,32	100,00
1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	100	100,00	88.648.000	86.269.600	97,32	100,00
ii	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100	100,00	66.890.000	65.550.000	98,00	100,00

1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	100	100,00	66.890.000	65.550.000	98,00	100,00
iii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	100,00	49.892.000	49.265.000	98,74	100,00
1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	100	100,00	25.324.000	24.905.000	98,35	100,00
2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	100	10,00	24.568.000	24.360.000	99,15	100,00
iv	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	100	100,00	147.069.000	139.048.175	94,55	100,00
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang terkumpul dan terolah	Dokumen	100	100,00	65.932.000	63.708.135	96,63	100,00

2	Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	Dokumen	100	100,00	30.669.000	28.674.280	93,50	100,00
3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	100	100,00	50.468.000	46.665.760	92,47	100,00
v	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	%	100	100,00	25.000.000	24.135.000	96,54	100,00
1	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	100	100,00	25.000.000	24.135.000	96,54	100,00
vi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100	100,00	86.226.000	62.172.424	72,10	100,00

	sampai dengan 12 Mil Laut								
1	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	100	100,00	86.226.000	62.172.424	72,10	100,00
vii	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase terlaksananya Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	%	100	100,00	70.708.000	68.667.200	97,11	100,00
1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	100	100,00	55.454.000	54.940.000	99,07	100,00
2	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	100	100,00	15.254.000	13.727.200	89,99	100,00
viii	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	%	100	100,00	195.257.200	136.616.354	69,97	100,00
1	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	100	100,00	136.257.200	79.017.754	57,99	100,00

2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Laporan	100	100,00	59.000.000	57.598.600	97,62	100,00
ix	Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1	Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	%	100	100,00	236.473.300	145.736.400	61,63	83,33
i	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	%	100	100,00	25.334.000	25.004.000	98,70	100,00
1	Pengendalian dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Laporan	100	100,00	25.334.000	25.004.000	98,70	100,00
ii	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	87.500.000	0	0,00	0,00

1	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	Jumlah Dokumen Data Potensi Biomassa	Dokumen	0,00	0,00	87.500.000	0	0,00	0,00
iii	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	25.294.000	25.057.000	99,06	100,00
1	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Laporan	100	100,00	25.294.000	25.057.000	99,06	100,00
iv	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	25.140.000	24.224.000	96,36	100,00
1	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	100	100,00	25.140.000	24.224.000	96,36	100,00
2	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah	Dokumen	100	100,00	0	0	0	0,00
v	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Persentase Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	%	100	100,00	37.666.000	36.653.000	97,31	100,00
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Laporan	100	100,00	37.666.000	36.653.000	97,31	100,00

vi	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	%	100	100,00	35.539.300	34.798.400	97,92	100,00
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	100	100,00	35.539.300	34.798.400	97,92	100,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	%	100	100,00	1.063.401.980	1.032.762.166	97,12	100,00
i	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	%	100	100,00	234.138.000	232.813.986	99,43	100,00
1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	100	100,00	234.138.000	232.813.986	99,43	100,00
ii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen dan Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	%	100	100,00	119.727.380	118.784.000	99,21	100,00
1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen	100	100,00	44.201.380	43.451.000	98,30	100,00

2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	100	100,00	75.526.000	75.333.000	99,74	100,00
iii	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	%	100	100,00	709.536.600	681.164.180	96,00	100,00
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen terkait Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Laporan	100	100,00	64.888.400	59.535.950,00	91,75	100,00
2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Kegiatan	100	100,00	579.952.200	558.296.600	96,27	100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Laporan	100	100,00	64.696.000	63.331.630	97,89	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kewenangan Provinsi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada beberapa sub urusan pemerintahan. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 79 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur no. 14 tahun 2016. Secara Kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok gubernur Sumatera Selatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan melalui perencanaan strategi pembangunan 5 (lima) tahunan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Adapun pada pasal 4, tugas Kepala Dinas adalah membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi.

b. Fungsi

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- d. pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar	Jumlah Produksi Batu Gamping	Ton	3,440,355.51	2,830,771.04	82,28	-
		Jumlah Produksi Clay Stone	Ton	431,219.40	378,846.28	87,85	-
		Jumlah Produksi Batubara	Ton	141,680,652.53	108,920,679.01	76,87	-
		Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	318	163,07	-
		Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat	%	33,3	40,73	122,3	-
2	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik Bagi Masyarakat	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW	4,209	3,768	89,52	-
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99	-
		Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,29	99,29	-
		Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/kapita	926	925,73	99,97	-
		Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	197,1	232,38	118,11	-
		Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	%	21,06	23,15	109,92	-
3	Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	300	584,281,223	194,76	-
		Jumlah PNPB Sektor Minerba	Rp Milyar	964,7	1,357,426,141,759	140,70	-
4	Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	91,52	91,52	-
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang	%	100	100.00	100.00	-

Capaian kinerja dinas adalah hasil yang dicapai oleh sebuah dinas atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian kinerja dinas biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 memiliki 4 Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar
2. Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik Bagi Masyarakat
3. Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM
4. Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki 15 Indikator Kinerja Daerah (IKU) dengan Pencapaian Kinerja sebesar 111,74%.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pertambangan Sumatera Selatan meliputi mineral logam, panas bumi, dan batubara. Provinsi Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya non logam, juga minyak dan gas bumi.

Tabel 2.3 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Logam	Besi Primer	1.131.840,00	0
Mineral Logam	Emas Primer	8,87	0,21
Mineral Logam	Perak	55,66	1,12
Mineral Logam	Seng	165,648	0
Mineral Logam	Tembaga	29	0
Mineral Logam	Timbal	19,488	122,792862
Panas Bumi	Panas Bumi Bukit Lumut Balai (Operasi)	0	110
Panas Bumi	Panas Bumi Lawang	55	0
Panas Bumi	Panas Bumi Marga Bayur	111	0
Panas Bumi	Panas Bumi Rantau Dedap - Segamit	49	92
Panas Bumi	Panas Bumi Tanjungsakti	80	0
Panas Bumi	Panas Bumi Ulu Danau	0	0
Panas Bumi	Panas Bumi Way Selabung	68	0
Batu Bara	Eksplorasi	13.867,33	-
Batu Bara	Evaluasi Potensi	13,38	-
Batu Bara	Konstruksi	81,24	-
Batu Bara	Operasi Produksi	29.378,47	-
Batu Bara	Propeksi	352,49	-
Batu Bara	Survei Tinjau	329,93	-
Minyak & Gas Bumi	Minyak Bumi	63,84	391,98
Minyak & Gas Bumi	Gas	901,02	4.428,26
Mineral Non Logam	Andesit	256.550.000	-
Mineral Non Logam	Granit	-	-
Mineral Non Logam	Marmer	-	-
Mineral Non Logam	Sirtu	210.000	-
Mineral Non Logam	Tras	1.650.000	-
Mineral Non Logam	Felspar	2.216.000	1.299.200
Mineral Non Logam	Kaolin	-	-
Mineral Non Logam	Lempung	2.594.958.673	15.751.311
Mineral Non Logam	Perlit	-	-

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Non Logam	Toseki	-	-
Mineral Non Logam	Batugamping	861.753.289	235.743.000
Mineral Non Logam	Bentonit	749.000	-
Mineral Non Logam	Pasirkuarsa	1.650.000	-

Sumber: Diolah dari Geoportal ESDM, diunduh tahun 2022

Untuk pertambangan batubara, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki jalan khusus batubara eksisting sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Jalan Khusus Batubara

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	± 120	Pelabuhan PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Kabupaten PALI hingga Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kabupaten Muara Enim
2	PT. Musi Mitra Jaya	± 133	Pelabuhan PT. Sriwijaya Bara Logistik di Kabupaten Musi Banyuasin hingga Stockpile PT. Gorby Putra Utama, Kabupaten Musi Rawas Utara
3	PT. Energate Prima Indonesia	± 51	Pelabuhan PT. Energate Prima Indonesia di Kabupaten PALI hingga Desa Benuang, Kabupaten PALI

Fungsi jalan khusus batubara yaitu dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan umum, mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan truk batubara dan kendaraan lain, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi pengangkutan, mendukung aktivitas pertambangan dan meningkatkan perekonomian daerah serta pembangunan jalan khusus ini merupakan bagian dari tanggung jawab pengusaha batubara untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Penggunaan jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga ditargetkan tanggal 1 Januari 2026 truk pengangkut batubara sudah tidak ada lagi yang lewat jalur umum.

Berikut data rencana Pembangunan Jalan Khusus batubara yang akan diselesaikan pada tahun 2025:

Tabel 2.3.2 Rencana Pembangunan Jalan Khusus Batubara

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	<u>28</u>	Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kab. Muara Enim hingga Stockpile PT. Bara Anugrah Sejahtera, Kab. Muara Enim
2	PT. Abani Andalus Energi	<u>120</u>	Desa Benuang, Kab. PALI hingga Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim
3	PT. Tiga Putri Bersaudara	<u>30</u>	Simpang PT. Muara Alam Sejahtera, Kab. Lahat hingga Stockpile KM 107 PT. Servo Lintas Raya, Kab. Muara Enim
4	PT. RMK Energy	<u>85</u>	Emplacement PT. Truba Bara Banyu Enim, Gunung Megang hingga WIUP PT. Duta Energy Mineratama, Tanjung Enim
5	PT. Marga Bara Jaya	<u>92</u>	Stockpile PT. Triaryani, Kabupaten Musi Rawas Utara hingga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin

Ketahanan energi adalah isu strategis yang penting untuk Sumatera Selatan, dan mencakup sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menjaga pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Berdasarkan data dari perusahaan Listrik Negara (PLN), pemenuhan kebutuhan listrik perkapita di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat, pada 2024 tumbuh sebesar 5,26%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) mencapai 14.907.914.901 kWh. Angka ini meningkat sebesar 86,08% dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.011.695.824 kWh pada 2023 dikarenakan PLTU MT Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 600 MW sudah beroperasi.

Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan energi baru terbarukan yang bersumber dari Air sebesar 21.93 MW, Tenaga Surya sebesar 8,86 MWp, panas bumi dan bio energi sebesar 146,2 MW dan 832,26 MW. Sebaran aneka energi baru terbarukan menyebar di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan total kapasitas sebesar 1.009,28 MW. Porsi EBT dalam bauran energi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai

23,12% (data belum final). Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah Indonesia yang sebesar 23,0% pada tahun 2025 (Perusahaan Listrik Negara, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi porsi kapasitas pembangkit terbarukan di Sumatera Selatan yaitu; (1) potensi sumber daya alam untuk pembangkit listrik terbarukan, seperti biomassa, panas bumi, dan energi air; (2) implementasi dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23,0% pada tahun 2025; dan (3) tingkat investasi terhadap pembangunan pembangkit listrik terbarukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2026 tidak terlepas dari kondisi yang ada saat ini dimana Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rancangan awal Renja Tahun 2026 juga dipengaruhi beberapa factor yaitu;

1. Sektor Pertambangan masih menjadi penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan
2. Adanya upaya efisiensi energi
3. Adanya upaya peningkatan Konservasi Energi
4. Pengurangan Ketrgantungan terhadap energi fosil
5. Peningkatan cakupan jaringan distribusi energi
6. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah terpencil
7. Penurunan Harga Energi
8. Subsudi dan Insentif energi untuk kelompok rentan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak

mampu yang meliputi biaya bantuan pasang baru listrik dan Material/jasa instalasi listrik.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berupaya secara optimal, antara lain adalah:

1. Menyediakan dukungan penuh dan koordinasi intensif bersama Pertamina, PLN dan KESDM RI dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi bahan bakar dan listrik bagi masyarakat di Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan pengawasan di daerah dalam rangka meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar (tata ruang, lingkungan dan sosial);
3. Melakukan koordinasi secara komprehensif dan terpadu bersama instansi terkait dalam rangka meningkatnya penerimaan sektor ESDM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam hal melaksanakan arah kebijakan tidak terlepas dari pedoman RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan, agar dalam melaksanakan strategi yang dipilih lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan arah kebijakan yang dirumuskan tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan:

1. Saat ini kebijakan energi daerah Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020–2050. Perda RUED dimaksud dapat ditinjau kembali dan dimukhtahirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu waktu bila terjadi perubahan lingkungan strategis dan perubahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
2. Revisi RUED memacu untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan PERDA RUED diharapkan implementasi RUED sebagai upaya yang terencana dan terpadu dengan dukungan lintas sektoral
3. Mereview ulang penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) agar dapat menjadi Peraturan Daerah sehingga menjadi acuan di Kabupaten/Kota serta menyusun kebijakan dan aturan turunan dari Perda RUED, dan atau kebijakan dan aturan pendukung dalam rangka mengimplementasikan RUED;
4. Mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan EBT dan dikaji kelayakannya.
5. Pengembangan pemanfaatan EBT skala kecil.

6. Mendorong pengembangan bioenergi.
7. Mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan dan sektor lainnya untuk berkontribusi pada penyediaan energi melalui pemanfaatan EBT di sekitar perusahaan.
8. Menyusun strategi pengembangan SDM untuk mencapai target-target RUED melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan, termasuk diantaranya strategi pembiayaan untuk pengembangan SDM tersebut.
9. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki komitmen kuat untuk membudayakan perilaku berhemat energi dalam operasional kantor sehari-hari bagi/oleh seluruh karyawan, melaksanakan tata laksana rumah tangga perkantoran sebagai tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman, memastikan perawatan rutin semua sarana prasarana elektronik seperti kendaraan bermotor listrik dan konvensional, PLTS rooftop, pengkondisi ruangan (air conditioner) dan sebagainya, mengutamakan menggunakan perangkat elektronik yang efisien energi dan atau sudah memiliki label hemat energi, giat mensosialisasikan konservasi energi dengan memberikan contoh panutan pelaksanaan konservasi energi, meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi konservasi energi dan sebagainya.
10. Membuat cetak biru pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat; Mendukung penuh operasional pengawasan minerba dengan melibatkan aparatur pusat melalui penyediaan anggaran di APBD;
11. Mereview secara periodik melalui Keputusan Gubernur terkait Penetapan Harga Jual Mineral non Logam dan Batuan; Mereview secara periodik melalui Keputusan Gubernur terkait Penetapan Harga Jual Air Tanah;
12. Percepatan peningkatan status IUP OP untuk segera berproduksi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja dirumuskan berdasarkan isu-isu penting yang sudah dijabarkan pada BAB sebelumnya. Tujuan dan sasaran rencana kerja untuk tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026**

No	Sasaran dalam Rencana	Tujuan dalam Rencana	Sasaran dalam Rencana Kerja
1.	Meningkatnya usaha mineral non logam dan batuan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan mineral non logam dan batuan	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha pertambangan mineral non logam dan untuk memenuhi kaidah-kaidah good mining practice
2.	Meningkatnya yang mendapatkan listrik	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan listrik	Ketersediaan akses listrik bagi masyarakat
3.	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	Meningkatkan kontribusi energi baru dan energi terbarukan terhadap kebutuhan energi dan	Ketersediaan akses energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
4.	Meningkatnya kinerja	Terwujudnya tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan	Terwujudnya pelayanan publik sektor ESDM yang profesional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ESDM PROV. SUMSEL

4.1 Program dan Kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas ESDM Prov. SUMSEL Tahun 2026

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
1	3.29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				25.378.060.519
2	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan	100%	24.268.460.519
3	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan	100%	16.000.000

5	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	1.200.000
6	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	1.800.000
7	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	1.200.000
8	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	1.800.000
9	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan	3 Laporan	10.000.000
10	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palembang	100%	21.295.571.540
11	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	182 Orang	21.206.387.540
13	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	11 Orang	89.184.000
14	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	-
15	3.29.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	-

16	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	100%	12.000.000
17	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	2 Orang	12.000.000
18	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	100%	325.888.979
19	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	8.000.000
20	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	1 Paket	-
21	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	132.000.000
22	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	1 Paket	40.000.000
23	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Luar Daerah	40 Laporan	145.888.979
24	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelambang	100%	150.000.000

25	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cabang Dinas Reg II dan 5 (Musi Banyuasin dan Lahat)	2 Unit	150.000.000
26	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palembang	100%	1.679.000.000
27	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	50 Pcs Materai	2.000.000
28	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	36 Buah ID Pelanggan	628.000.000
29	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	2 Paket	1.049.000.000
30	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palembang	100%	290.000.000
31	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palembang	20 Unit Mobil, 10 Unit Motor	240.000.000
32	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	3 Unit	50.000.000

33	3.29.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palembang	100%	500.000.000
34	3.29.01.1.10.01	Pelayanan dan Pelayanan Penunjang BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Palembang	1 unit kerja	500.000.000
35	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	Sumatera Selatan	100%	20.000.000
36	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Sumatera Selatan	100%	20.000.000
37	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	4 Laporan	20.000.000
40	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	232.200.000
41	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	24.000.000

42	3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	OKI, OKU, MUARAENIM, LAHAT, BANYUASIN	5 Laporan	24.000.000
43	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	40.000.000
44	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	OKI, Lahat, Banyuasin, OKUT	4 Laporan	20.000.000

45	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	BANYUASIN, OKU, OKUT, MUARAENIM, LAHAT	5 Laporan	20.000.000
46	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	20.000.000
47	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	OKU, MUBA, Lahat	3 Laporan	10.000.000

48	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	OKU, MUBA, Lahat	3 Laporan	10.000.000
49	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	38.000.000
50	3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang terkumpul dan terolah	Lahat, Muara Enim, OKU, Lubuk Linggau, MUBA, OI, Palembang, Banyuasin	7 Laporan	26.000.000
51	3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	Lahat, Muara Enim, OKU	3 Laporan	12.000.000
55	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	28.000.000

56	3.29.03.1.13.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	lahat, Muba, Palembang, Banyuasin, Muara Enim, OKU, OI	6 Laporan	28.000.000
57	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase terlaksananya Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	37.200.000
58	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	OI, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, MUBA, OKUT	6 Laporan	27.200.000
59	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Palembang, Muba, Lubuk linggau, Lahat, Muaraenim, OKU, OI	7 Laporan	10.000.000
60	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	45.000.000
61	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Muba, Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Pulau Jawa	5 Laporan	30.000.000

62	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Banyuasin, Muara Enim, Lahat, PALI, MUBA	5 Laporan	15.000.000
65	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Palembang	100%	100.000.000
70	3.29.05.1.06	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	30.000.000
71	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	OKI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OI, Lahat, OKU	6 Laporan	30.000.000
72	3.29.05.1.07	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	20.000.000

73	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	OKU Selatan, Lahat, Muara Enim	3 Laporan	20.000.000
74	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	-
76	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	25.000.000
77	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	OI, Muara Enim, OKU, MURA, PALI	5 Laporan	25.000.000
78	3.29.05.1.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	100%	25.000.000

79	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	MURA, OKI, OKU, Prabumulih, Muaraenim	5 Laporan	25.000.000
80	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Sumatera Selatan	100%	757.400.000
81	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	100%	62.400.000
82	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Pemegang IUPTLS	Palembang, Banyuasin, Muba, Lubuk Linggau, Lahat, Muara Enim, OKU, OKUT, OKI	13 Laporan	62.400.000
83	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen dan Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Provinsi Sumatera Selatan	100%	37.400.000
84	3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya	Jumlah Rekomtek IUJPTL	Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Muara Enim, Prabumulih, OKU	9 Rekomendasi	17.400.000

		Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				
85	3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Pemegang IUJPTL	Palembang, Prabumulih, OKU, Muara Enim	12 Laporan	20.000.000
86	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Selatan	100%	657.600.000
87	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen terkait Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	OI dan OKU Timur	4 buku	30.000.000
88	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	OI dan OKU Timur	200 KK	590.000.000
89	3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	OI dan OKU Timur	2 Laporan	12.000.000

90	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Muba, Muara Enim, Lahat, Banyuasin	4 Buku	25.600.000
----	-----------------	---	--	---------------------------------------	--------	------------

BAB V PENTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] Tahun Anggaran 2026 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] Tahun Anggaran 2025 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra SKPD], mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
4. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Palembang, 05 Januari 2026

Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005